BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan ialah institusi memiliki peran dalam menghimpun, mengatur, serta mendistribusikan keuangan yang berasal dari warga (Puspa, 2024). Sebagian besar masyarakat di Indonesia memerlukan lembaga keuangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan membantu dalam mengelola keuangan yang lebih aman dan teratur. Dengan adanya lembaga keuangan, masyarakat dapat menabung, meminjam dana, melakukan transaksi, dan mendapatkan layanan yang menunjang pertumbuhan ekonomi, baik secara individu atau kelompok. Lembaga keuangan yang berperan besar pada tingkat desa, terutama yang ada di Bali yakni LPD. Dasar pembentukan LPD yaitu berdasarkan Peraturan Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2007, di mana disebutkan bahwasanya LPD merupakan entitas bisnis milik desa dengan cakupan operasional di area desa demi kemaslahatan warga desa (Dewi *et al*., 2020). LPD di setiap desa adat atau desa pakraman di Bali diatur oleh Pemerintah Daerah Bali pada tahun 1984 (Dewi *et al*., 2020).

LPD merupakan inisiatif dari pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sumber permodalan bagi masyarakat di tingkat desa. LPD adalah suatu entitas finansial perdesaan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Bali (Vijaya *et al*., 2021). LPD ialah entitas keuangan yang dibentuk oleh desa Pakraman untuk memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi, dengan maksud mendorong taraf hidup warga desa Pakraman itu sendiri (Sujana *et al*., 2022). LPD juga menjadi tempat mengatur aset di perdesaan, baik berupa uang maupun aset finansial, yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan usaha masyarakat.

Melalui aktivitasnya, LPD berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran warga desa (krama desa) serta membantu mempercepat proses pembangunan dan kemandirian ekonomi di tingkat desa (Widiani & Sulindawati, 2022). LPD di Bali pada dasarnya bertujuan guna membantu pembangunan di setiap desa adat atau desa pakraman sebagai pilar untuk melestarikan tradisi serta kebudayaan Bali yang menjadi sarana terbaru guna meningkatkan pemasukan modal bagi anggota masyarakat (Vijaya *et al*., 2021). Pembangunan ekonomi dapat dimulai di desa dan jika kondisi ekonomi di desa merata, hal ini akan berdampak positif pada stabilitas di daerah pedesaan, maka LPD memiliki potensi besar untuk mendukung kemajuan ekonomi pedesaan, sebagaimana tercermin dalam peluang pasar yang bersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adelia *et al*., 2025). Di samping itu, keberadaan instansi pemerintahan mencakup Badan Pengawas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (BPKS UKM), Dinas Koperasi dan UKM, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) turut mendampingi pergerakan LPD (Damayanti & Yudantara, 2025). LPD sendiri berkedudukan sebagai entitas keuangan dengan kepemilikan penuh oleh desa adat, serta memiliki kedudukan yang unik karena tidak berada di bawah peraturan lembaga keuangan lainnya. Pengelolaannya hanya mengacu pada peraturan daerah Provinsi Bali serta aturan yang ditetapkan oleh desa adat dan jenis pinjaman yang diberikan LPD pun memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan nilai dan nuansa tradisional masyarakat adat Bali (Astawa *et al*., 2024). LPD berkedudukan sebagai entitas finansial berstatus kepemilikian penuh oleh desa adat serta memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan simpan pinjam yang mengedepankan kearifan lokal.

Keberadaan LPD sangat memudahkan warga desa dalam memperoleh akses

ke layanan keuangan tanpa perlu mengunjungi bank konvensional yang lokasinya mungkin jauh atau sulit dijangkau. Selain itu, LPD juga memiliki fungsi sebagai sarana utama dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi fondasi utama perekonomian di tingkat lokal. Keberadaan LPD dianggap mampu mendekatkan masyarakat dengan kebijakan pemerintah serta mendorong kemajuan pembangunan ekonomi desa melalui pemberian kredit kepada warga yang memerlukan modal usaha (Puspita & Pradana, 2023). LPD diharapkan mampu mengumpulkan dana dari warga desa dan mendistribusikan kembali lewat pinjaman yang berguna untuk menyongsong pengembangan usaha kecil dan menengah milik warga setempat dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh modal usaha yang aman, sehat, dan terjamin guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Ariastuti *et al.*, 2020).

Berdasarkan data dari satu data Indonesia Provinsi Bali pada tahun 2024 terdapat sekitar 1.500 desa adat yang secara ideal masing-masing memiliki satu LPD. Namun demikian, jumlah LPD yang beroperasi aktif tercatat sebanyak 1.439 LPD (Bali, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada sebagian desa adat yang tidak memiliki ataupun belum mengaktifkan lembaga keuangannya. Kondisi tersebut menandakan bahwa meskipun LPD telah tersebar hampir di seluruh wilayah Bali, peluang untuk memperluas jangkauan dan memperkuat kelembagaan LPD di beberapa desa adat masih sangat terbuka, guna mendorong pemerataan ekonomi yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, distribusi LPD di setiap kabupaten/kota di Bali memperlihatkan variasi yang cukup beragam. Kabupaten dengan jumlah desa adat yang lebih banyak secara logis punya jumlah LPD yang lebih banyak pula.

Meskipun demikian, tidak semua LPD dapat beroperasi secara aktif karena sebagian di antaranya menghadapi berbagai kendala operasional, proses penataan kelembagaan maupun penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku.

Kabupaten Buleleng yang dikenal sebagai wilayah dengan cakupan administratif terluas di Provinsi Bali memiliki jumlah desa adat yang cukup besar. Berdasarkan data yang tersedia, tercatat sebanyak 144 LPD yang masih aktif beroperasi di wilayah ini. Jumlah tersebut menunjukkan peran penting Kabupaten Buleleng dalam mempertahankan keberlangsungan sistem LPD, khususnya di kawasan Bali bagian Utara.

Secara keseluruhan, LPD di Kabupaten Buleleng tersebar di seluruh kecamatan dan memiliki kontribusi signifikan terhadap penguatan ekonomi masyarakat desa adat. Fungsi utama LPD di daerah ini meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit, serta pembiayaan berbagai kegiatan sosial dan adat. Kinerja positif lembaga-lembaga tersebut menjadi bagian penting dari total 1.439 LPD aktif di seluruh Provinsi Bali sekaligus mencerminkan keberhasilan implementasi sistem keuangan berbasis adat di tingkat lokal. Agar lebih mudah dipahami, data jumlah LPD disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. 1
Data Jumlah LPD Kabupaten Buleleng Tahun 2026

Kecamatan	LPD
Buleleng	16
Banjar	12
Busung Biu	13
Gerokgak	14
Kubutambahan	13
Sawan	18
Seririt	19
Sukasada	17
Tejakula	13
Total	**135**

Sumber: LPLPD Kabupaten Buleleng

Pertumbuhan LPD di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng menampilkan dinamika yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Mengacu pada data dari Satuan Data Indonesia Provinsi Bali Tahun 2024, terdapat 170 desa adat di Kabupaten Buleleng, di mana 135 di antaranya telah memiliki LPD yang aktif beroperasi. Angka ini menunjukkan hampir seluruh desa adat di wilayah tersebut telah difasilitasi dengan lembaga keuangan lokal yang berfungsi sebagai perantara keuangan sekaligus motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Tingginya jumlah LPD tersebut mencerminkan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan keuangan desa, namun juga mengindikasikan potensi tantangan yang cukup kompleks dalam hal tata kelola, sistem pengawasan, dan keberlanjutan operasional lembaga tersebut. Tantangan tersebut terbukti nyata di lapangan jika merujuk pada kondisi mutakhir, di mana catatan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) per Februari 2026 mengindikasikan bahwa jumlah LPD aktif di Kabupaten Buleleng yang masih beroperasi saat ini adalah sebanyak 135 LPD. Fakta bahwa ada sekitar 34 LPD yang kini berstatus tidak aktif atau berhenti beroperasi menjadi indikator kuat bahwa kemudahan perluasan akses lembaga keuangan belum sepenuhnya diimbangi dengan manajemen risiko dan tata kelola

yang mumpuni. Hal ini mempertegas urgensi penguatan sistem pengawasan dan pembinaan demi menjaga keberlanjutan operasional LPD yang tersisa serta untuk memulihkan kembali kepercayaan krama adat terhadap lembaga keuangan milik desa adat di Buleleng.

Meskipun memberikan kontribusi yang besar, LPD juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan pengelolaan internal. Tindak penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, hingga rekayasa laporan keuangan merupakan bentuk kecurangan (*fraud*) yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. *Fraud* didefiinisikan sebagai tindakan manipulatif atau penyampaian informasi yang tidak benar dalam pengelolaan dan pelaporan kekayaan demi meraih keuntungan secara individu atau golongan tertentu (Arthana, 2019). *Fraud* merupakan bentuk penyimpangan yang marak dijumpai serta dijalankan dengan kesadaran oleh sebagian orang demi keuntungan diri sendiri yang akhirnya dapat merugikan pihak lain (Arthana, 2019). Tingginya risiko *fraud* tidak hanya dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan namun dapat dipicu oleh faktor individu seperti dorongan kuat terhadap uang (*love of money*) dan rendahnya moral serta integritas pribadi dalam menjalankan etika kerja. Di samping itu, kelemahan pada sistem pengendalian internal turut membuka celah bagi oknum tertentu untuk melakukan kecurangan secara terstruktur.

LPD berperan penting dalam mendorong kemandirian perekonomian warga adat di Bali lewat sistem pengelolaan keuangan yang berbasis pada desa. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini menghadapi beberapa kasus yang merusak reputasinya, terutama di wilayah Kabupaten Buleleng. Dalam beberapa tahun terakhir, LPD di Kabupaten Buleleng menghadapi berbagai kasus yang

melibatkan pengurus lembaga tersebut. Berbagai peristiwa ini menunjukkan adanya permasalahan dalam tata kelola dan pengawasan internal lembaga keuangan desa adat. Sejumlah kasus yang mencuat memperlihatkan pola penyimpangan yang relatif serupa, seperti penyalahgunaan wewenang, praktik kredit fiktif, serta penyelewengan dana simpanan masyarakat. Kondisi tersebut bukan hanya berdampak buruk pada lembaga dari sisi finansial, melainkan turut berdampak pada menurunnya tingkat kredibilitas publik pada LPD selaku entitas keuangan berbasis desa adat. Beberapa kasus yang menjadi sorotan publik terjadi di sejumlah desa adat di Kabupaten Buleleng, antara lain di Desa Adat Tamblang, Desa Anturan, Desa Pekraman Gerokgak, Desa Unggahan, dan Desa Adat Ngis. Berikut rangkuman kasus-kasus yang terjadi di beberapa desa adat di Kabupaten Buleleng dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Kasus-kasus yang Terjadi di LPD Kabupaten Buleleng

Tahun	Desa/Lokasi	Kasus	Pihak yang Terlibat	Nilai Kerugian/Nominal	Sumber Berita
2023 – 2025	Desa Adat Tamblang	Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana LPD yang menyebabkan kerugian negara. Sekretaris LPD dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta, sementara ketua LPD dan dua mantan pengurus juga ditahan karena terlibat dalam skandal korupsi yang sama.	Sekretaris LPD, Ketua LPD, dan dua mantan pengurus LPD.	Kerugian negara Rp1,5 miliar, denda Rp200 juta.	(Kusuma, 2023); (Pratama, 2025); dan (Mercury, 2025).

Tahun	Desa/Lokasi	Kasus	Pihak yang Terlibat	Nilai Kerugian/Nominal	Sumber Berita
2021 – 2023	Desa Unggahan	Ketua LPD dan Kepala Tata Usaha diduga menyelewengkan dan angsuran masyarakat yang tidak disetorkan ke kas LPD. Proses audit oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng menetapkan kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar setelah proses penghitungan berlangsung lebih dari dua tahun.	Ketua LPD dan Kepala Tata Usaha.	Kerugian negara Rp1,8 miliar.	(Desiani, 2023); dan (Amd, 2023)
2018 – 2020	Desa Anturan	Mantan Ketua LPD melakukan korupsi melalui penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kredit yang menyebabkan kerugian negara sangat besar. Terdakwa divonis 10 tahun penjara, denda Rp500 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp5,33 miliar.	Mantan Ketua LPD.	Kerugian negara Rp151,5 miliar, denda Rp500 juta, uang pengganti Rp5,33 miliar.	(Hasan & Hartik, 2023); (Ridwan, 2023); (Mahendro, 2023); dan (Posbali, 2023).
2009 – 2022	Desa Adat Ngis	Ketua LPD melakukan korupsi dengan membuat kredit fiktif atas nama diri sendiri,	Ketua LPD.	Kerugian negara Rp10,4 miliar.	(Ginta & Hartik, 2024); dan (Rizki, 2024).

Tahun	Desa/Lokasi	Kasus	Pihak yang Terlibat	Nilai Kerugian/Nominal	Sumber Berita
		keluarga, dan pihak lain tanpa sepengetahuan mereka. Selain itu juga menggunakan dana deposito dan tabungan sukarela nasabah untuk kepentingan pribadi.			
2008 – 2020	Desa Pekraman Gerokgak	Pengurus LPD diduga melakukan korupsi melalui pembuatan kredit fiktif tanpa jaminan untuk kepentingan pribadi dengan modus kas bon yang dialihkan menjadi kredit atas nama pengurus maupun keluarga.	Sekretaris LPD, Bendahara LPD, dan Karyawan Bagian Kredit.	Kerugian sekitar Rp1,2 miliar.	(U. Dewi, 2021).

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026)

Kasus korupsi yang melibatkan LPD di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian publik karena menimbulkan kerugian keuangan yang cukup besar serta berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan desa. Salah satu peristiwa terjadi di Desa adat Tamblang, di mana penyalagunaan wewenang oleh pengurus LPD menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,5 miliar (Kusuma, 2023).

Dalam proses hukum, sekretaris LPD Desa Adat Tamblang telah dijatuhi sanksi pidana kurungan 3 tahun beserta denda senilai Rp 200 juta. Putusan ini

menunjukkan keseriusan penegak hukum terhadap pelaku korupsi di tingkat lokal serta upaya untuk memberikan efek jera kepada individu lain yang mungkin terlibat dalam praktik serupa (Pratama, 2025). Selain itu, kejaksaan juga telah menahan dua mantan pengurus LPD Desa Adat Tamblang yang terlibat dalam skandal korupsi yang sama bersama dengan ketua LPD. Penahanan tersebut memperlihatkan bahwa penyelidikan yang dilakukan bukan hanya berfokus dengan satu individu, tetapi melibatkan jaringan yang lebih kompleks dalam pengelolaan LPD yang tidak transparan (Mercury, 2025).

Temuan penyimpangan pengelolaan keuangan juga terjadi pada LPD Desa Unggahan. Dalam kasus ini, ketua LPD bersama kepala tata usaha ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan dana angsuran masyarakat yang tidak disetorkan ke kas LPD. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Buleleng, kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1,8 miliar (Desiani, 2023). Proses penetapan nilai kerugian negara bahkan memerlukan waktu lebih dari dua tahun karena adanya koordinasi antara penyidik dan auditor untuk melengkapi dokumen laporan keuangan sebelum nilai kerugian tersebut ditetapkan secara resmi (Amd, 2023).

Fenomena penyalahgunaan kewenangan dalam pengelola LPD juga tercermin pada peristiwa yang terjadi di Desa Anturan. Dalam kasus ini, mantan ketua LPD dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun atas tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp151,5 miliar. Selain hukuman penjara, ia juga diwajibkan untuk melunasi denda sebesar Rp 500 juta pengganti dua tahun penjara serta pengembalian kerugian negara sebesar Rp 5,33 miliar pengganti tiga tahun kurungan. Kasus korupsi ini melibatkan penyalahgunaan wewenang dan

penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat setempat (Hasan & Hartik, 2023).

Kasus korupsi tersebut mulai mencuat pada pertengahan tahun 2020 ketika LPD Anturan mengalami kondisi kolaps. Pada awalnya kondisi tersebut diduga disebabkan oleh banyaknya nasabah yang tidak mampu membayar kredit. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, ditemukan adanya dugaan praktik korupsi yang terjadi selama masa kepemimpinan ketua LPD sejak sekitar tahun 2018 hingga 2020 yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar 151,5 miliar (Ridwan, 2023).

Dalam proses persidangan juga terungkap bahwa kerugian negara tersebut berkaitan dengan pengelolaan kredit yang bermasalah. Tunggakan bunga dari sejumlah kredit nasabah kemudian dialihkan menjadi kredit baru tanpa adanya perjanjian maupun dokumen resmi antara nasabah dengan pihak LPD. Praktik tersebut menyebabkan munculnya kredit fiktif dalam jumlah besar sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan (Mahendro, 2023).

Selain itu, majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa hukuman yang diberikan pada terdakwa tidak seberat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mula-mula mematok vonis penjara selama 18 tahun 6 bulan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa meskipun terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, perbuatannya tetap dinilai memberatkan karena menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara pada nominal yang fantastis (Posbali, 2023).

Penyimpangan dalam pengelolaan LPD dengan nilai kerugian yang cukup besar juga teridentifikasi di Desa Adat Ngis. Ketua LPD dijadikan pihak tersangka

mengenai indikasi kejahatan korupsi dengan total kerugian mencapai Rp10,4 miliar. Modus yang digunakan berupa pembentukan kredit fiktif atas nama diri sendiri, keluarga maupun pihak lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan sejak tahun 2009 hingga 2022 (Ginta & Hartik, 2024). Selain itu, tersangka juga melakukan penarikan dan penggunaan dana deposito serta tabungan sukarela milik nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman sebelumnya serta memenuhi kepentingan pribadi (Rizki, 2024).

Indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana LPD juga terungkap pada LPD Desa Pekraman Gerokgak. Dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan tiga pengurus sebagai tersangka, yaitu sekretaris, bendahara, dan karyawan bagian kredit, ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui pembuatan kredit fiktif tanpa jaminan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian sekitar Rp1,2 miliar. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang menjerat ketua LPD yang telah divonis bersalah pada tahun 2020. Modus yang digunakan berupa pembuatan kas bon secara bertahap sejak tahun 2008 yang kemudian dialihkan menjadi kredit atas nama pengurus maupun anggota keluarganya (U. Dewi, 2021).

Merujuk pada deretan peristiwa yang sudahdiuraikan tersebut, tampak jelas jika permasalahan kecurangan pada LPD tidak hanya terjadi secara insidental, tetapi juga menunjukkan adanya kecenderungan pola yang berulang dalam pengelolaan lembaga. Fenomena tindakan kecurangan yang muncul di LPD di Kabupaten Buleleng tidak hanya menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat kasuistik, tetapi juga mengindikasikan adanya pola yang berulang dalam tata kelola lembaga. Berbagai kasus yang telah terjadi memperlihatkan bahwa praktik

kecurangan umumnya dilakukan oleh pihak internal yang memiliki akses langsung terhadap pengelolaan keuangan, seperti ketua, sekretaris, bendahara, maupun bagian kredit. Pola kecurangan yang sering ditemukan meliputi penyalahgunaan wewenang, pembuatan kredit fiktif, penggelapan dana simpanan nasabah, serta manipulasi laporan keuangan yang dijalankan secara terencana pada kurun waktu khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecurangan tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari adanya kesempatan yang terbuka akibat lemahnya pengendalian internal serta kurangnya pengawasan yang efektif.

Pemilihan variabel kecenderungan *fraud* dalam penelitian ini sangat krusial karena dapat mengidentifikasi hubungan antara *love of money*, moralitas individu dan pengendalian internal terhadap perilaku korupsi di LPD Kabupaten Buleleng. Dengan menganalisis kecenderungan *fraud*, peneliti dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu tindakan kecurangan serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif guna meningkatkan akuntabilitas serta keterbukaan dalam penataan keuangan lembaga.

Selain itu, besar nominal kerugian yang ditimbulkan dalam beberapa kasus bahkan mencapai miliaran hingga ratusan miliar rupiah, menunjukkan bahwa dampak *fraud* pada LPD tidak hanya bersifat administratif tetapi telah berkembang menjadi permasalahan serius yang dapat mengancam keberlangsungan lembaga. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa tingginya *love of money* dan lemahnya moralitas individu dapat mendorong pelaku untuk tetap melakukan tindakan kecurangan meskipun mengetahui risiko hukum yang akan dihadapi. Maka dari itu, fenomena ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam untuk mengidentifikasi

faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan *fraud* serta merumuskan upaya pencegahan yang lebih efektif dalam pengelolaan LPD.

Fenomena kecurangan yang muncul pada LPD di Kabupaten Buleleng juga mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara nilai moral individu dan dorongan untuk meraih keuntungan finansial yang lebih besar. Dengan memasukkan variabel kecenderungan *fraud*, penelitian ini juga berupaya untuk menyelidiki interaksi antara *love of money* dan moralitas individu dalam konteks pengendalian internal yang ada. Hal ini penting untuk memahami apakah kelemahan dalam pengendalian internal berkontribusi terhadap meningkatnya kecenderungan *fraud* serta untuk mengidentifikasi area-area kritis di mana intervensi dapat dilakukan.

Fenomena *fraud* di lembaga keuangan bukanlah hal baru, namun dalam konteks LPD yang berbasis adat dan mempunyai karakteristik lokal yang unik, dinamika ini perlu ditelusuri secara kontekstual. Penelitian terdahulu telah memberikan hasil yang beragam. Dalam penelitian ini menggunakan *Fraud Triangle Theory* sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan unsur-unsur yang memengaruhi timbulnya kecenderungan *fraud* di LPD Kabupaten Buleleng. Konsep tersebut awal mulanya diintroduksi oleh Cressey serta menyatakan bahwasanya kecurangan dipicu oleh tiga komponen pokok, yaitu tekanan *(pressure)*, peluang *(opportunity)*, dan rasionalisasi *(rationalization)*. Tekanan mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan spesifik, peluang muncul karena lemahnya sistem pengendalian atau pengawasan, sementara rasionalisasi memungkinkan individu membenarkan tindakan *fraud* yang dilakukannya. *Fraud Triangle* menyajikan suatu kerangka kerja yang bermanfaat bagi entitas maupun instansi untuk mengkaji kerentanan atau kelemahan instansi terhadap *fraud* (Wicaksono &

Prabowo, 2022). Teori ini mengindikasikan jikalau individu cenderung melakukan *fraud* ketika menghadapi kendala finansial yang sulit diatasi secara terbuka (tekanan), percaya dan paham jika persoalan tersebut dapat ditanggulangi secara diam-diam melalui pekerjaan maupun posisi guna menguasai kekayaan hingga membentuk pemikiran seolah pengguna atas kekayaan yang diamanahkan (pembenaran/rasionalisasi) (Tickner & Button, 2021). Sebagian besar dari oknum perilaku kecurangan mengerti serta memahami perbuatan tersebut ialah perbuatan yang tergolong ilegal, tetapi oknum kecurangan tersebut menciptakan anggapan jika perilaku yang dieksekusi tergolong wajar (Wicaksono & Prabowo, 2022).

Love of Money merupakan sikap seseorang yang sangat mementingkan materi dalam kehidupannya. Orang dengan kecenderungan ini biasanya menilai kesuksesan dan kebahagiaan dari seberapa banyak uang yang dimiliki. Karena terlalu fokus pada uang, seseorang bisa saja melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya bahkan sampai melanggar aturan atau nilai-nilai etika. Setiap orang memiliki tingkat "cinta terhadap uang" yang berbeda dan hal ini bisa memengaruhi cara berpikir serta tindakannya dalam mencari kekayaan. Dalam teori *fraud triangle*, *love of money* termasuk dalam elemen tekanan *(pressure)* karena keinginan kuat untuk memiliki banyak uang dapat menimbulkan dorongan atau tekanan bagi seseorang untuk melakukan tindakan curang atau korupsi demi mencapai tujuan finansialnya.

Faktor tekanan *(pressure)* dapat bersumber dari tuntutan finansial, pola hidup konsumtif, maupun adanya desakan dari pihak luar yang memicu perangkat desa untuk menyelewengkan anggaran desa (Putri *et al*., 2025). Adapun bentuk tekanan dalam kondisi ini yang dapat menjadi pemicu untuk melakukan perbuatan

menyimpang yang berujung pada kecurangan bersifat emosional, yakni desakan akibat ketamakan (Wardhani, 2025). Konsep *love of money* mempunyai hubungan erat ketamakan serta sumber dari bermacam tindak kejahatan, kian tinggi kegandrungan seseorang pada uang mampu memicu individu berbuat melenceng dari ajaran agama untuk memperkaya dirinya (Nursanti & Tumirin, 2022). Keterkaitan ini memperjelas bahwa elemen tekanan sumbernya tidak selalu dari krisis keuangan eksternal, melainkan bisa berasal dari dorongan psikologis internal. *Love of money* berfungsi sebagai indikator yang mengukur besarnya beban mental yang diciptakan individu pada dirinya sendiri untuk memenuhi ambisi kekayaan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh riset yang dijalankan (Wardhani & Sinarwati, 2025) dalam penelitiannya memperlihatkan jika orientasi kecintaan uang tidak memicu kontribusi bermakna bagi potensi timbulnya *fraud*, sementara bagi penelitian (Nugroho *et al*., 2024) memperlihatkan jikalau *love of money* memberikan kontribusi positif serta bermakna bagi tindakan manipulasi keuangan dana desa.

Moralitas individu adalah norma serta pedoman yang memandu seseorang menentukan hal yang patut serta hal yang keliru. Nilai ini terlihat dari cara seseorang bersikap, berbicara, dan mengambil keputusan ketika menghadapi masalah etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka *Fraud Triangle* moralitas individu termasuk dalam elemen rasionalisasi *(rationalization)* karena berkaitan langsung dengan bagaimana individu menilai dan membenarkan perilakunya, dengan kata lain moralitas individu memengaruhi seberapa mudah seseorang membenarkan tindakan curang di dalam pikirannya. Unsur rasionalisasi bisa menjadi pemicu seorang memilih untuk melakukan kecurangan dan individu

yang memiliki moral minim cenderung membenarkan perbuatannya atau mencari pembelaan mengenai tindakan yang diperbuat walaupun tindakan tersebut adalah tindakan yang menyimpang (Wardhani, 2025). Individu yang melakukan *fraud* sering kali tidak merasa bersalah karena mereka meyakinkan diri bahwa tindakannya bisa diterima secara moral (Putri *et al*., 2025). Maka dari itu, moralitas individu termasuk ke dalam unsur rasionalisasi, yaitu proses ketika seseorang mencoba membenarkan perbuatan curang yang dilakukan. Moralitas yang kuat akan membuat seseorang sulit untuk mencari alasan pembenaran atas tindakan curang, sedangkan moralitas yang lemah mampu memicu seseorang kian mudah menjustifikasi perbuatan melanggar etika seperti korupsi atau kecurangan lainnya sehingga dinamika ini memunculkan mekanisme psikologis yang kompleks di dalam diri seseorang. Hubungan antara moralitas individu dan rasionalisasi sebagai mekanisme tarik-menarik di dalam pikiran individu, dimana teori *Fraud Triangle* menempatkan rasionalisasi sebagai pemicu kecurangan.

Setiap individu secara ilmiah memiliki insting untuk membenarkan tindakannya demi menjaga citra diri yang positif. Namun, moralitas individu bertindak sebagai sistem kontrol internal utama yang menyaring insting pembenaran tersebut. seseorang dengan moralitas tinggi memiliki kapasitas pengendalian diri yang kuat. Mereka mampu menolak godaan rasionalisasi jauh sebelum tindakan kecurangan terjadi. Sebaliknya, moralitas yang lemah membuat pertahanan internal ini runtuh sehingga mekanisme rasionalisasi mengambil alih keputusan. Proses interaksi internal inilah yang menempatkan moralitas sebagai variabel penekan rasionalisasi. Penguatan standar moral secara logis akan

memblokir proses rasionalisasi dan pada akhirnya menurunkan kecenderungan perilaku *fraud*.

Hal ini pun diperkuat oleh studi yang dijalankan (Korompis *et al*., 2019) dalam kajiannya memaparkan bahwasanya etika pribadi tidak mendatangkan dampak bagi kecurangan *fraud* dan (Wardhani & Sinarwati, 2025) mengemukakan bahwa moralitas individu tak memberikan kontribusi signifikan terhadap potensi timbulnya kecurangan, sementara pada penelitian (Yusmaniarti & Sari, 2024) mengemukakan bahwa moralitas individu memberikan dampak positif serta bermakna pada potensi kecurangan *fraud* akuntansi.

Moralitas individu dan *love of money* memegang dua fungsi internal yang berbeda dalam kerangka *Fraud Triangle*. *Love of money* menciptakan dorongan finansial yang memicu elemen tekanan. Sikap ini membuat seseorang fokus pada keuntungan materi semata. Di sisi lain, moralitas individu mengendalikan elemen rasionalisasi. Nilai moral menentukan seseorang membenarkan atau menolak tindakan curang. Dengan demikian, *love of money* memicu timbulnya niat, sedangkan moralitas individu membatasi pembenaran atas niat tersebut. Namun, kombinasi faktor psikologis ini tidak akan menghasilkan aksi tanpa adanya celah dari organisasi, yaitu elemen kesempatan. Efektivitas pengendalian internal menentukan ketersediaan celah kesempatan tersebut.

Pengendalian internal merupakan mekanisme yang dirancang guna memantau serta menilai kinerja organisasi agar tujuan bisa tercapai dengan baik, aset tetap aman, dan kegiatan berjalan sesuai aturan. Jika pengendalian internal dan pengawasan melemah maka akan memicu individu guna berbuat kecurangan (Riantini, 2024). Peluang atau tersebut mampu memicu dampak berakibat buruk

bagi entitas, sebab kekurangan pada kontrol internal yang diterapkan disalahgunakan oleh oknum tertentu (Riantini, 2024). Lemahnya sistem pengendalian internal serta minimnya keterbukaan pada tata kelola dana desa kerap memicu munculnya celah (*opportunity*) bagi oknum aparatur desa guna melancarkan aksi korupsi tanpa diketahui (Putri *et al*., 2025). Maka dari itu, dalam *fraud triangle theory,* pengendalian internal termasuk dalam unsur kesempatan *(opportunity)*, akni situasi yang memicu individu untuk melancarkan *fraud*. Kesempatan ini biasanya muncul karena lemahnya sistem pengawasan, kurangnya kontrol, atau akses yang terlalu bebas terhadap aset dan informasi. Dengan demikian, penerapan kontrol internal yang kokoh memegang peranan krusial guna menekan celah bertindak curang pada lingkup organisasi.

Mekanisme kesempatan ini mempertegas fungsi utama pengendalian internal di dalam organisasi. Pengendalian internal beroperasi sebagai sistem pencegahan langsung yang membatasi ruang gerak individu untuk berbuat curang. Pengawasan yang ketat menutup celah operasional dan meningkatkan risiko terdeteksinya tindakan menyimpang. Kondisi ini secara langsung meruntuhkan kalkulasi keuntungan yang ingin dicapai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya penurunan kualitas kontrol internal akan membuka celah keamanan dan memberikan akses tanpa batas terhadap aset organisasi. Proses interaksi ini menempatkan pengendalian internal sebagai variabel penentu yang memitigasi elemen kesempatan. Penguatan pengendalian internal secara logis akan memperkecil ruang kesempatan dan pada akhirnya menurunkan kecenderungan perilaku *fraud*.

Temuan ini turut didukung oleh riset yang dilakukan (Pratiwi *et al*., 2024) dalam penelitiannya mengemukakan jikalau kontrol internal memberikan pengaruh negatif pada potensi aksi kecurangan (*fraud*), sementara (Prasilia *et al*., 2024) mengemukakan bahwasanya kontrol internal memberikan dampak positif serta bermakna pada potensi aksi kecurangan. Riset ini disusun sebagai upaya untuk melengkapi kekurangan pada penelitian sebelumnya dengan menggabungkan variabel *love of money*, moralitas individu, dan pengendalian internal yang memiliki potensi pengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan solusi yang tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga praktis untuk mencegah terulangnya kasus kecurangan kedepannya. Penelitian ini juga berpotensi menyajikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan aturan yang lebih rigid serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif sehingga LPD dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, penting dijalankan penelitian mendalam untuk melihat sejauh mana faktor-faktor seperti dorongan kuat terhadap uang (*love of money*), moralitas individu, dan sistem pengendalian internal berperan untuk mendorong terjadinya *fraud* di LPD, khususnya di wilayah Kabupaten Buleleng. Hal ini bertujuan untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap LPD sebagai lembaga keuangan yang transparan, terpercaya, dan bermanfaat bagi komunitas desa.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk penjelasan latar belakang sebelumnya, ditemukan beberapa persoalan yang diidentifikasi pada penelitian ini:

1. Kontribusi LPD terhadap perekonomian desa di Kabupaten Buleleng cukup besar, namun keberlanjutannya masih dihadapkan pada risiko terjadinya kecurangan *(fraud)* yang dapat mengancam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
2. Kejadian *fraud* yang muncul di lingkungan LPD menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan internal serta adanya pengaruh dari individu yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan keuangan.
3. Dorongan yang tinggi terhadap uang *(love of money)* pada pengelola LPD di duga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya *fraud*, meskipun sejumlah penelitian sebelumnya memberikan hasil yang saling bertentangan mengenai pengaruh variabel ini.
4. Rendahnya moralitas individu dalam pelaksanaan tugas berpotensi meningkatkan kecenderungan melakukan kecurangan, namun hingga kini pengaruh moralitas terhadap *fraud* masih menjadi perdebatan karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak seragam.
5. Sistem pengendalian internal yang belum optimal di dalam struktur organisasi LPD dapat menjadi celah terjadinya kecurangan, meskipun dalam beberapa penelitian, variabel ini menunjukkan hubungan yang bervariasi terhadap kecurangan *fraud* baik secara positif maupun negatif.
6. Perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu mengenai pengaruh *love of money*, moralitas individu, dan pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud* menunjukkan adanya kesenjangan empiris yang perlu dijawab melalui penelitian lebih lanjut, khususna dalam konteks LPD di Kabupaten Buleleng yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas.

1.3 Pembatasan masalah

Dari latar belakang serta identifikasi masalah, penelitian ini memiliki beberapa pembatasan untuk memperjelas ruang lingkup kajian, yaitu:

1. Riset ini berfokus pada LPD di wilayah Kabupaten Buleleng, Bali yang dipilih karena memiliki jumlah LPD yang tinggi serta aktivitas ekonomi desa yang cukup aktif, sehingga dianggap *representatif* untuk mengkaji permasalahan *fraud* dalam konteks lembaga keuangan berbasis lokal.
2. Ruang lingkup riset ini terbatas pada tiga variabel bebas, yaitu *love of money*, moralitas individu, dan pengendalian internal yang diasumsikan mempunyai pengaruh terhadap kecurangan *fraud* sebagai variabel terikat.
3. Subjek penelitian dibatasi pada pengurus atau pegawai internal LPD, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan, serta proses pengambilan keputusan finansial guna memastikan keterkaitan yang kuat antara data yang dikumpulkan dan isu *fraud* yang diteliti.
4. Riset ini menerapkan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa *survei* melalui penyebaran kuesioner, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan atau parsial dari masing-masing variabel.
5. Adapun variabel lain di luar *love of money*, moralitas individu, dan pengendalian internal tidak dibahas pada riset ini, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain yang turut berkontribusi terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* di lingkungan LPD.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada konteks latar belakang, identifikasi, serta pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini dimaksudkan guna menguji hal-hal berikut ini:

1. Untuk menganalisis apakah *love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.
2. Untuk menganalisis apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.
3. Untuk menganalisis apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

1.6 Manfaat hasil penelitian

Temuan dari riset ini diharapkan mampu memberikan dua manfaat yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Masing-masing manfaat dipaparkan, yakni:

1. **Manfaat Teoritis**
   a. Riset ini diantisipasi sanggup menghadirkan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu di sektor akuntansi dan manajemen lembaga keuangan, terutama yang berkaitan dengan unsur-unsur yang memicu kecenderungan terjadinya *fraud* dalam konteks lembaga keuangan berbasis masyarakat lokal seperti LPD.

b. Riset ini memperkaya literatur akademik melalui pendekatan yang menggabungkan tiga variabel penting seperti, *love of money*, moralitas individu, dan pengendalian internal yang masih jarang diteliti secara simultan terutama dalam kerangka lembaga keuangan yang berbasis adat.

c. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana karakteristik personal dan sistem organisasi berperan dalam mendorong tindakan kecurangan, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan teori keagenan, etika perilaku, dan konsep pengendalian internal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi LPD:

1) Menyajikan arahan strategis guna memperkuat sistem pengendalian internal serta membangun integritas dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat menurunkan risiko terjadinya *fraud*.

2) Menjadi alat evaluasi dalam proses seleksi, pengembangan sumber daya manusia, dan pelatihan pegawai guna mewujudkan lingkungan kerja yang mengedepankan nilai etika dan tanggung jawab.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Regulator:

1) Menyediakan data dan temuan yang dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan pengawasan, pembinaan, serta penguatan kapasitas LPD, khususnya di wilayah Kabupaten Buleleng.

2) Memberikan dasar untuk merancang program pembinaan terkait peningkatan moralitas, kompetensi pengelolaan keuangan, dan tata kelola organisasi yang baik dalam mencegah praktik *fraud*.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti:

1) Menjadi referensi dalam pengembangan penelitian lanjutan di bidang akuntansi forensik, perilaku etika organisasi, serta sistem pengendalian internal, khususnya dalam konteks lembaga keuangan lokal.

2) Menyajikan pandangan empiris baru terkait keterkaitan dimensi individu serta kelembagaan terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* dalam skala komunitas desa.

d. Bagi Masyarakat Umum (khususnya warga desa adat):

1) Meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya keterbukaan serta pertanggungjawaban pada tata kelola finansial yang dijalankan LPD.

2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial terhadap operasional LPD guna menjaga kepercayaan dan mendukung keberlanjutan lembaga keuangan berbasis desa.